



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faksimile (021) 5203117



Nomor : KO.02.02/2/94/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Webinar Sosialisasi Kesehatan Pekerja Perempuan

25 Januari 2022

Yth. (daftar terlampir)

Dalam semarak Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022 dengan tema bidang kesehatan “Penerapan Budaya K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi” dan Menilai keberhasilan implementasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di tempat Kerja, bersama ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri **Webinar Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Pekerja Wanita** yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : R rapat 722.
Meeting ID : 815 6569 0085
Passcode : 868988
Link : <https://link.kemkes.go.id/KesjaPerempuan>
Tema : Penurunan angka anemia di tempat kerja

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan narahubung dr. Tri Danu Warsito (Telp. 081280968181).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga,

dr. Kartini Rustandi, M.Kes
NIP. 196304071987122001

Lampiran (1)
Nomor : KO.02.02/2/94/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

A. PESERTA DAERAH

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
- 2) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- 5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- 7) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara
- 8) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- 9) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- 10) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- 11) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- 12) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat
- 13) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
- 14) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
- 15) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
- 16) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
- 17) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau
- 18) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- 19) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- 20) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- 21) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- 22) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi
- 23) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- 24) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- 25) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- 26) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 27) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan
- 28) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
- 29) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
- 30) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
- 31) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
- 32) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu

- 33) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
- 34) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
- 35) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
- 36) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 37) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung
- 38) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- 39) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- 40) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- 41) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
- 42) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Bangka Belitung
- 43) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung
- 44) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung
- 45) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung
- 46) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- 47) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau
- 48) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
- 49) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
- 50) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
- 51) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 52) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta
- 53) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- 54) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- 55) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- 56) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 57) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat
- 58) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 59) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 60) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 61) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 62) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah
- 63) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- 64) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- 65) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- 66) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
- 67) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi DI Yogyakarta
- 68) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
- 69) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
- 70) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
- 71) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

- 72) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur
- 73) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- 74) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- 75) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- 76) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
- 77) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten
- 78) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
- 79) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
- 80) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
- 81) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- 82) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Bali
- 83) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- 84) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- 85) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- 86) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 87) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 88) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 89) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 90) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 91) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 92) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 93) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 94) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 95) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 96) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
- 97) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat
- 98) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- 99) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- 100) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- 101) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- 102) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur
- 103) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
- 104) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
- 105) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
- 106) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- 107) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah

- 108)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- 109)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- 110)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- 111)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
- 112)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan
- 113)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- 114)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- 115)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- 116)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- 117)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara
- 118)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
- 119)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
- 120)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
- 121)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
- 122)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara
- 123)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
- 124)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
- 125)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
- 126)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- 127)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah
- 128)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
- 129)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
- 130)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
- 131)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 132)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan
- 133)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- 134)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- 135)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- 136)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
- 137)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 138)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 139)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 140)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 141)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
- 142)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat

- 143)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat
- 144)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat
- 145)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat
- 146)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- 147)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo
- 148)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
- 149)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
- 150)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
- 151)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
- 152)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku
- 153)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
- 154)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
- 155)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
- 156)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
- 157)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara
- 158)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
- 159)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
- 160)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
- 161)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
- 162)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Papua
- 163)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
- 164)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
- 165)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
- 166)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 167)Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi cq. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat
- 168)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
- 169)Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
- 170)Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

B. PESERTA PUSAT (Diharapkan hadir secara luring / langsung)

- 1) Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kementerian Ketenagakerjaan
- 2) Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak – Kementerian Ketenagakerjaan
- 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 4) Direktur Kesehatan Keluarga
- 5) Direktur Gizi Masyarakat
- 6) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Direktur Kesehatan Lingkungan
- 8) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 9) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
- 10) Kepala Pusat Penelitian Kesmas Litbang Kes.

- 11) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- 12) Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
- 13) Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
- 14) Ketua Indonesian Networking Occupational Safety and Health Professional (INOSHPRO)
- 15) Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI)
- 16) Ketua Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI)
- 17) Ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)
- 18) Ketua Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia (PERKESJA)
- 19) Ketua Indonesian Industrial Hygiene Association (IIHA)
- 20) JFT Pembimbing Kesehatan Kerja Madya/ Koordinator Okupasi dan Surveilans
- 21) JFT Adminkes Madya/ Koordinator Kapasitas Kerja
- 22) JFT Pembimbing Kesehatan Kerja Madya/ Koordinator Kesehatan Lingkungan Kerja
- 23) JFT Adminkes Madya/ Koordinator Kesehatan Olahraga
- 24) Kasubag Administrasi dan Umum

C. PESERTA PERUSAHAAN

1	PT. Unilever indonesia	Kota Cikarang	Jawa Barat
2	PT. Kmk global sport k1	Kab Tangerang	Banten
3	PT. Panasonic shikoku	Kota Batam	Kepri
5	PT. Adis dimension foot wear	Kab Tangerang	Banten
6	PT. Unisem	Kota Batam	Kepri
7	PT. Yupi indo jelly gum	Kab. Bogor	Jawa Barat
8	PT. Apac inti corpora	Kab Semarang	Jawa Tengah
9	PT. Pertamina	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
10	PT. Asia Dwi Mitra	Kab Banten	Banten
11	PT. Chang Shin	Kab Karawang	Jawa barat
12	PT. Epson Batam	Kota Batam	Kepri
13	PT. Victory ching luh	Kab tangerang	Banten
14	PT. Total e & p indonesia	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
15	PT. Hindoli a cargill company	Kab Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
16	PT. Daya Manunggal	Kab Bekasi	Jawa Tengah
17	PT. Gunung sejahtera Putri Ibu	Kab Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
18	PT. Ungaran sari garment	Kab Unggaran	Jawa Tengah
19	PT. Sido Muncul	Kab. Semarang	Jawa Tengah
20	PT. Harapan Sawit Lestari	Kab. Ketapang	Kalimantan Barat
21	PT. Shan You Fung	Kab.Tangerang	Banten
22	PT. Phapros	Kab. Semarang	Jawa Tengah
23	PT. Freetrend	Kab Tangerang	Banten
24	PT. Newmont Nusa Tenggara	Kota Sumbawa	NTB
25	PT. Excelitas Technologies	Kota Batam	Kepri
26	PT. Indofood Cbp	Kab Pasuruan	Jawa Timur
27	PT. Nesia Pan Pasific Knit	Kab Semarang	Jawa Tengah
28	PT. Mustika Sembuluh	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
29	PT. MAS Sumbiri	Kab. Kendal	Jawa Tengah
30	PT. Changshin Reksa Jaya	Kab. Garut	Jawa Barat
31	PT. Sri Rejeki Isman Tbk	Kota Sukaharjo	Jawa Tengah
32	PT. EPCOS Indonesia	Kab Kep. Bintan	Kepri
33	PT. Graha Cakra Mulia	Kab. Sukamara	Kalimantan Tengah
34	PT. Pasit Sembada	Kab. Belitung Timur	Bangka Belitung

35	PT. Panarub	Kab. Tangerang	Banten
36	PT. Salonok Ladang Mas	Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah
37	PT. Inti Sukses Garmino	Kab. Semarang	Jawa Tengah
38	PT. Hutan Hijau Mas	Kab. Berau	Kalimantan Timur
39	PT. Citra Busana Semesta	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah
40	PT. Aneka Tuna Indonesia	Kab Pasuruan	Jawa Timur
41	PT. Mattel Indonesia	Kab Bekasi	Jawa Barat
42	PT. Riau Andalan Pulp And Paper	Kab Pelalawan	Riau
43	PT. Prima Sejati Sejahtera	Kab Boyolali	Jawa Tengah
44	PT. Kahatex	Kab Sumedang	Jawa Barat
45	PT. Pratama Abadi Industri	Kota Tangerang Selatan	Banten
46	PT. Bumi Bangka Lestari	Kab. Bangka Tengah	Bangka Belitung
47	PT. Gula Putih Mataram	Kab Lampung Tengah	Lampung
48	PT. Inti Indosawit Subur	Kab. Batanghari	Jambi
49	PT. Windu Nabatindo Lestari	Kab. Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
50	PT. Frisian Flag Indonesia	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
51	PT. Ekadura Indonesia	Kab Rokan Hulu	Riau
52	PT. Gunung Maras Lestari	Kab Bangka	Bangka Belitung
53	PT. Harapan Hibrida Kalbar	Kab Sukamara	Kalimantan Tengah
54	PT. Agro Lestari Sentosa	Kab Gunung Mas	Kalimantan Tengah
55	PT. Sumber Mahardika Graha	Kab Lamandau	Kalimantan Tengah
56	PT. TK Industrial Indonesia	Kab Subang	Jawa Barat
57	PT. Eksonindo Multi Product Industri	Kab Bandung	Jawa Barat
58	PT. Shindengen Indonesia	Kab Bekasi	Jawa Barat
59	PT. Eco Smart Garment Indonesia	Kab Boyolali	Jawa Tengah
60	PT. Batik Arjuna Cemerlang	Kab Sukoharjo	Jawa Tengah



Pt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga,

drg. Martini Rustandi, M.Kes

N.P. 196304071987122001

Lampiran (2)
Nomor : KO.02.02/2/94/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

**JADWAL TENTATIF WEBINAR
SOSIALISASI KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA
Kamis, 27 Januari 2022**

Waktu	Acara	Narasumber
09.00 – 09.30	Pembukaan	MC
	- Pembacaan Do'a	
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Semua Peserta
	- Laporan Ketua Panitia	Koordinator Substansi Kapasitas Kerja
	- Sambutan sekaligus Membuka Acara	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
09.30 – 10.00	Paparan Kebijakan Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
10.00 – 10.45	Strategi penurunan jumlah anemia WUS dan Pemberian Tablet Besi para pekerja perempuan dalam mewujudkan pekerja produktif di tempat kerja	Asosiasi profesi/praktisi gizi
10.45 – 10.50	Senam peregangan oleh seluruh peserta	Pemutaran video peregangan
10.50 – 11.40	Kesuksesan pemberian tablet tambah darah dan penurunan angka anemia di tempat kerja	Best Praktis. PT Ungaran Sari Garment Kab Semarang
11.30 – 11.45	Diskusi/tanya jawab	Jabfung Pemkesja Madya
11.45 – 12.00	Penutupan	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KEGIATAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN DAN OLAHRAGA
SOSIALISASI PENINGKATAN KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN GP2SP
TAHUN 2022

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat/ Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Program	:	Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja 2. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga
Kegiatan	:	Sosialisasi Kesehatan Pekerja Perempuan GP2SP
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	1 (satu)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- f. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-02/Men/1980 tentang
- h. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
- i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan No.2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2013 tentang TataCara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan No.328 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

- m. Keputusan Menteri Kesehatan No.413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- n. Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. HK.03.01/MENKES/31/2017, No. 119/207A/SJ, No. 1/KB/MEN/I/2017, No. 1/MPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif.
- o. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan.

2. Gambaran Umum

Sumber daya manusia Indonesia yang produktif secara sosial dan ekonomi merupakan modal pembangunan bangsa. Upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan berdaya saing dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya status atau kondisi kesehatan. Upaya kesehatan kerja dan olahraga ditujukan untuk mewujudkan masyarakat pekerja di Indonesia agar sehat, bugar, dan produktif

Dari data BPS (2021), ditunjukkan bahwa penduduk usia kerja sebanyak 206,71 juta orang, dan tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 66,7% atau sebanyak 131,05 juta orang, 53,13% nya adalah pekerja perempuan pekerja perempuan yang tersebar di berbagai lapangan pekerjaan dengan berbagai permasalahan di tempat kerja. Pekerja perempuan harus ditempatkan sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan kesehatan. Pekerja perempuan rentan mengalami eksploitasi, terpapar bahaya dan risiko pekerjaannya, serta menghadapi permasalahan kesehatan reproduksi karena mengalami fase hamil, melahirkan dan menyusui. Permasalahan lainnya adalah tingkat pendidikan pekerja perempuan masih rendah. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021 menunjukkan bahwa upah buruh Wanita lebih rendah dibandingkan laki laki sebesar 2.35% upah pekerja perempuan lebih rendah di semua kelompok umur maupun semua kelompok jenjang Pendidikan dibandingkan laki-laki. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan tentang kesehatan

Upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja perempuan merupakan hal yang sangat penting karena kegiatan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan secara umum serta berkontribusi dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Komponen yang perlu diperhatikan juga adalah kasus Anemia pada pekerja perempuan, pelayanan Kesehatan Reproduksi dan juga Penyakit Menular Pada Pekerja Wanita. Di sisi lain, pekerja perempuan yang juga sebagai sumber daya manusia Indonesia, dituntut dapat bersaing dengan Negara lain sehingga berperan dalam peningkatan produktivitas pekerja agar dapat menggerakkan ekonomi Indonesia. Untuk itu, upaya perlindungan kesehatan pekerja perempuan sangatlah penting dilaksanakan di Indonesia.

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) adalah upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Program GP2SP ini terdiri dari program jaminan pemenuhan hak kesehatan pekerja perempuan meliputi pelayanan kesehatan reproduksi pekerja perempuan yang hamil, deteksi dini penyakit tidak menular, pemenuhan kecukupan gizi pekerja

perempuan yang hamil dan menyusui, peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja, dan pengendalian lingkungan bagi pekerja perempuan berisiko. Mengingat manfaat pelaksanaan program GP2SP di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas dengan mengurangi hilang waktu kerja akibat sakit atau gangguan reproduksi khususnya pekerja perempuan dan masih banyaknya sasaran perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan GP2SP diperlukan berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi dan pembinaan GP2SP secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan integrasi program kesehatan kerja untuk pekerja perempuan di perusahaan, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesehatan bagi Pekerja Perempuan melalui Webinar sebanyak tiga kali webinar sosialisasi yang saat ini diarahkan pada penurunan angka anemia pekerja wanita usia subur yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan penyakit menular pada pekerja perempuan di tempat kerja.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan advokasi dan sosialisasi kepada penanggungjawab program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Lintas program dan lintas sektor terkait pekerja dan industri, pelaku usaha dan Institusi Perusahaan serta Masyarakat Pekerja di seluruh Indonesia dalam penerapan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya peningkatan kesehatan pekerja perempuan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

2. Tujuan Khusus

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman lintas sektor upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan stunting melalui kegiatan GP2SP
- b. Meningkatkan jumlah provinsi yang melaksanakan program kesehatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja

C. Sasaran

Penerima manfaat dari kegiatan ini antara lain penanggung jawab program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Lintas program dan lintas sektor terkait pekerja dan industri, pelaku usaha dan Institusi Perusahaan serta Masyarakat Pekerja di seluruh Indonesia.

D. Rundown Acara

Waktu	Acara	Narasumber
09.00 – 09.30	Pembukaan	MC
	- Pembacaan Do'a	
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Semua Peserta
	- Laporan Ketua Panitia	Koordinator Substansi Kapasitas Kerja
	- Sambutan sekaligus Membuka Acara	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
09.30 – 10.00	Paparan Kebijakan Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
10.00 – 10.45	Strategi penurunan jumlah anemia WUS dan Pemberian Tablet Besi para pekerja	Asosiasi profesi/praktisi gizi

	perempuan dalam mewujudkan pekerja produktif di tempat kerja	
10.45 – 10.50	Senam peregangan oleh seluruh peserta	Pemutaran video peregangan
10.50 – 11.40	Kesuksesan pemberian tablet tambah darah dan penurunan angka anemia di tempat kerja	Best Praktis.
11.30 – 11.45	Diskusi/tanya jawab	Jabfung Pemkesja Muda
11.45 – 12.00	Penutupan	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga

E. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Pelaksanaan

Kegiatan advokasi dan sosialisasi melalui webinar untuk membangun komitmen pelaksanaan GP2SP oleh para penanggung jawab program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Lintas program dan lintas sektor terkait pekerja dan industri, pelaku usaha dan Institusi Perusahaan serta Masyarakat Pekerja di seluruh Indonesia.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi Kesehatan Pekerja Perempuan GP2SP menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dalam bentuk zoom meeting.

F. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis, 27 Januari 2022

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Meeting ID : 815 6569 0085

Passcode : 868988

Join Zoom Meeting:

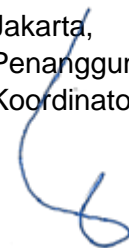
<https://us02web.zoom.us/j/81565690085?pwd=NnVBK0hsaTdhRjhEYVlqSVdRQVN0UT09>

atau <https://link.kemkes.go.id/KesjaPerempuan>

G. Biaya Yang Diperlukan

Sumber biaya dari kegiatan ini berasal dari DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Jakarta, Januari 2022
 Penanggung jawab,
 Koordinator Substansi Kapasitas Kerja


 dr. Rusmiyati, MQIH
 NIP 196508091990112001